

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR  
PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PRIBADI YANG MELAKUKAN  
PEKERJAAN BEBAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi Islam**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H/2017 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR  
PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PRIBADI YANG MELAKUKAN  
PEKERJAAN BEBAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi Islam**



Pembimbing I : **Hanif, S.E.,M.M.**

Pembimbing II : **Yulistia Devi, M.S.Ak.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1438 H/2017 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR  
PAJAK BAGI WAJIB PAJAK PRIBADI YANG MELAKUKAN  
PEKERJAAN BEBAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)**

**ABSTRAK**

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan dalam membayar pajak harus dimiliki oleh Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dikarenakan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan dilaksanakan sistem *Self Assessment System*, maka selain pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sampel terpilih sebanyak 100 responden dengan teknik *convenience sampling* di Kota Bandar Lampung. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, dan untuk menentukan hipotesis digunakan uji t, dan uji F serta menganalisis menurut persepektif ekonomi Islam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dengan nilai beta sebesar 0.485, pengetahuan peraturan perpajakan dengan nilai beta sebesar 0.248, dan persepsi yang baik atas sistem perpajakan dengan nilai beta sebesar 0.436 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas secara parsial dan simultan.

**Kata Kunci :** Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas, Perspektif Ekonomi Islam.

## MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS.Al-Baqarah[2]: 195).





## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam penulis skripsi ini penuli persembahkan kepada :

1. Bapak dan Mamah tercinta yang selalu memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, dan do'a yang tak pernah putus-putusnya untuk penulis. Tete dan adik tercinta Suci Cintya Dewi dan M. Raffa Arya Nugraha dan juga kepada segenap keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis.
2. Terimakasih untuk Dicky Widyan Pratama selalu memberikan semangat, nasihat, waktu dan segalanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selalu semangat dan sukses buat kita berdua.
3. Para sahabat dan teman-teman tercinta yang telah membantu memberikan motivasi, semangat dan dukungan untukku.
4. Rekan kerja, mba Noor, mba Yuli dan Mba Dona yang telah membantu membagi waktu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dianugerahi nama oleh ayahanda dan ibunda yaitu Masela anggita Sari. Dilahirkan di Bandar lampung, 12 April 1995. Putri kedua dari tiga bersaudara atas pasangan Bapak Aan .S dan Ibu Asniwaty.

Riwayat Pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah

1. Pendidikan MIN 1 T.Karang pada tahun 2007.
2. Selanjutnya, di SMP Negeri 10 Bandar lampung pada tahun 2010.
3. Kemudian dilanjutkan di MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Dengan puji syukur kehadiran Allah SWT, dan juga dukungan dari orang tua dan keluarga, penulis dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi yaitu UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam pada tahun 2013.

## KATA PENGANTAR

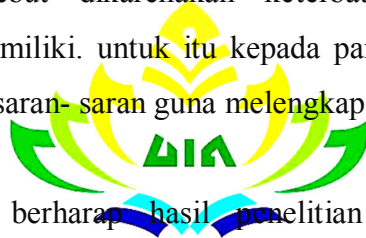
Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat iman, Islam dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas ( Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)”**. Shalawat beserta salam semoga terus tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Moh Bahrudin, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Madnatsir, S.E.,M.Si., sebagai ketua jurusan/prodi, terima kasih atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa studi di UIN Raden Intan Lampung.
3. Hanif,S.E.,M.M., dan Yulistia Devi, M.S.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan pencerahan dan ilmu pengetahuan yang luas kepada penulis selama perkuliahan.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Intan Lampung yang telah membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.

6. Teman-teman seperjuangan satu angkatan 2013 khususnya Ekonomi Islam B yang sama-sama berjuang dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas akhir kuliah.
7. Pimpinan dan staf di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton yang telah memberikan informasi, data, dan lain – lain.
8. Dan seluruh pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu, terimakasih banyak telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki. untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran- saran guna melengkapi hasil penelitian ini.



Akhirnya penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, November 2017

Masela Anggita Sari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Penegasan judul .....	1
B. Alasan memilih judul .....	2
C. Latar belakang masalah .....	3
D. Batasan masalah .....	9
E. Rumusan masalah .....	9
F. Tujuan dan manfaat penelitian .....	10
 <b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	 <b>13</b>
A. Kajian Teori .....	13
1. Pajak .....	13
a. Pengertian Pajak .....	13
b. Jenis – Jenis Pajak .....	16
c. Fungsi dan Manfaat Pajak .....	17
d. Pemungutan Pajak .....	19
e. Pajak Menurut Syariat Islam .....	23
2. Kemauan Membayar Pajak .....	27
a. Kesadaran Membayar Pajak .....	29
b. Pengetahuan Peraturan Perpajakan .....	32
c. Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan .....	33
3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.....	36
B. Peneliti – Peneliti Terdahulu .....	38
C. Kerangka Pemikiran .....	45
D. Hipotesis .....	46



<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Ruang Lingkup Penelitian .....	47
B. Jenis dan Sifat Penelitian .....	47
C. Sumber Data .....	48
D. Metode Penelitian Sampel .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	51
F. Metode Analisis Data .....	53
1. Statistik Deskriptif .....	53
2. Kualitas Data .....	53
3. Analisis Pengujian Asumsi Klasik .....	55
4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	57
5. Uji Hipotesis .....	60
G. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya .....	62
<b>BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>68</b>
A. Gambar Umum Objek Penelitian .....	68
1. Profil dan Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton .....	68
2. Wilayah Kerja .....	69
B. Analisis dan Pembahasan .....	74
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	75
2. Hasil Uji Kualitas Data .....	78
3. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	82
4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	85
5. Hasil Uji Hipotesis .....	90
6. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas .....	94
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Keterbatasan dan Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>107</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Penelitian-penelitian Terdahulu .....	39
3.1	Pengukuran Terhadap Variabel Independen.....	66
4.1	Struktur Organisasi KPP Pratama kedaton.....	70
4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	76
4.3	Hasil Uji Validitas Kesadaran Membayar Pajak .....	78
4.4	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Peraturan Perpajakan .....	79
4.5	Hasil Uji Validitas Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan .....	80
4.6	Hasil Uji Validitas Kemauan Membayar Pajak .....	80
4.7	Hasil Uji Reliabilitas Data .....	82
4.8	Hasil Uji Multikolonieritas .....	84
4.9	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	86
4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	89
4.11	Hasil Uji Statistik t .....	91
4.12	Hasil Uji Statitik F .....	93

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Keterangan	Halaman
2.1	Skema Kerangka Pemikiran .....	45
4.1	Hasil Uji Normalitas Data (P – P Plot) .....	83





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton) Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi yaitu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
2. Kemauan membayar pajak (*willing to pay tax*) : Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayarkan,

mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa.<sup>1</sup>

3. Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas: Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketentuan dan tata cara umum perpajakan, salah satu yang dikenai kewajiban untuk menyetorkan pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Kewajiban pajak ini dikenai atas orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
4. Prespektif Ekonomi Islam merupakan pandangan atau tinjauan ilmu ekonomi yang dilihat dari syariat atau kaidah aturan Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul proposal, hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui faktor – faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemauan membayar bagi Wajib Pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam perspektif Ekonomi Islam.

### **2. Alasan Subjektif**

Penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan. Hal ini didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan. Hal ini bisa

---

<sup>1</sup> Widaningrum, Dwi. 2007.” Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah”. ( 2009).

mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, selain itu judul yang penulis ajukan telah sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dibangku kuliah khususnya jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Agar proses pembangunan dapat dilakukan dengan lancar dan berkesinambungan diperlukan adanya hubungan yang seimbang antara anggaran pendapatan dan belanja negara secara dinamis dan proporsional. Pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang penting dalam menunjang penyelenggaraan negara.<sup>3</sup> Berdasarkan data dari BPS mengenai realisasi penerimaan negara tahun 2007-2017, total penerimaan APBN dari sektor pajak memegang peranan yang dominan dibanding sumber

---

<sup>2</sup> Mulyo Agung, *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, ( Jakarta:Dinamika Ilmu, 2007),h. 67

<sup>3</sup> Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

penerimaan bukan pajak. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak tahun 2007 hingga 2017 yang selalu di atas 68%, sedangkan penerimaan bukan pajak tidak selalu lebih dari 32% dari total penerimaan negara. Ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak menjadi andalan utama dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>4</sup>

Di beberapa Negara maju yang memberlakukan Wajib Pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman,dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Namun masih banyak Wajib Pajak yang tidak memiliki kesadaran atau kemauan mereka untuk membayar pajak.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak.

---

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:ANDI Yogyakarta, 2008), h.1

Tatiana dan Priyo (2009) menjelaskan kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak.

Kemauan dalam membayar pajak harus dimiliki oleh Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, dikarenakan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan dilaksanakan sistem *Self Assessment System*, maka selain pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>5</sup>



Dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 74.499 kata atau 325.345 suku kata tidak ditemukan satu pun kata "pajak", berbeda halnya dengan kata Zakat yang terdapat sebanyak 30 kali. Namun demikian, dalam terjemahan Al-Qur'an terdapat 1x kata "pajak", yaitu QS. At-Taubah [9]:29. Kata "Jizyah" pada ayat tersebut diterjemahkan dengan "Pajak". Walau demikian, tidak semua kitab Al-Qur'an menerjemahkan kata "Jizyah" menjadi "Pajak" melainkan tetap Jizyah saja, misalnya Kitab Al-Qur'an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI.<sup>6</sup>

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى  
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka,

---

<sup>5</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007), h. 27-28.

<sup>6</sup> *Ibid*,h.29

sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS AT- Taubah [9] ayat 29)”<sup>7</sup>.

Pada penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian Tatiana dan Priyo (2009), Widayati dan Nurlis (2010) dan penelitian Monica (2011) yang menggunakan tiga variabel dalam penelitian mereka, yaitu *Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan*. Perbedaan tahun dilakukan penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Perbedaan pada tempat penelitian, dimana penelitian dilaksanakan di Bandar Lampung serta study kasus pada KPP Pratama Kedaton dan juga adanya penambahan menurut perspektif ekonomi Islam dalam penelitian ini.

Terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, seperti hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yaitu kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.30

Sedangkan hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yaitu Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan, pemahaman, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton)”**.

#### **D. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis membatasi penelitian ini pada faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan pada wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:



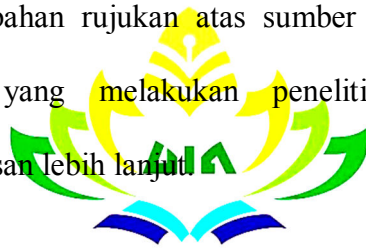
1. Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
2. Bagaimana tinjauan perspektif Ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung ?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
  - b. Untuk mengetahui dari segi perspektif Ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung.
2. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Bagi Akademis, penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi dan juga dapat menjadi acuan bagi studi tentang

faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak atau penelitian yang sejenis.

- b. Bagi penyusun, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan faktor- faktor kemauan dalam membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung.
- c. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>8</sup>

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

---

<sup>8</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:ANDI Yogyakarta, 2007), hlm.1

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Beberapa ahli keuangan negara, ekonomi, maupun perpajakan atau lembaga memberikan pengertian atau definisi tentang pajak.

Menurut The organization for economic and development (OECD) dalam Susan M. Lyons (editor), international Tax Glossary, menyatakan *“Tax a Compulsary unrequited payment s to the goverments. A Tax may be asseted on a person, entity, assets, etc,”* ( “Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah. Pajak dapat menilai seseorang, entitas , kekayaan, dan lainnya”).<sup>9</sup>

Sedangkan Indonesia, dalam UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983), untuk pertama kalinya dalam peraturan pajak Indonesia diberikan pengertian pajak yaitu “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Liberti Pandingan, *Administrasi Perpajakan*, (Jakarta: ERLANGGA, 2014), hlm.4

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.4

Dalam kehidupan sehari-hari kita, tanpa disadari kita sering menyebutkan kata “Pajak” atau “Perpajakan” untuk hal yang sama. Sebenarnya kata Pajak dan perpajakan memiliki pengertian dan penggunaan yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat secara praktis sebagai berikut.<sup>11</sup>

(a) Pajak : cenderung untuk hal yang bersifat material, seperti:

Jenis pajak apa : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang mewah dan sebagainya. Betapa besarnya pajak yang harus dibayar : Rp.100.000 ( seratus ribu rupiah), Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan sebagainya.

(b) Perpajakan : Keseluruhan yang menyangkut proses atau kegiatan yang berkaitan dengan pajak (mulai pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak). Misalnya, perpajakan atas industri garmen, kewajiban perpajakan bagi WP, kebijakan perpajakan,dan sebagainya.<sup>12</sup>

#### **b. Jenis – Jenis Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Adapun penjelasannya sebagai berikut<sup>13</sup> :

##### **1) Menurut Golongannya**

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.4

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta:ANDI Yogyakarta, 2008), hlm 5

(a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak penghasilan.

(b) Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

(a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

daerah. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor dan Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.<sup>14</sup>

**c. Fungsi dan Manfaat Pajak**

1) Fungsi Pajak, yaitu<sup>15</sup> :

(a) Fungsi Budgeter

Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

(b) Fungsi Mengatur Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2) Manfaat pajak, yaitu<sup>16</sup> :

(a) Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Penggunaan uang pajak, meliputi;

(b) Belanja Pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan;

(c) Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah, sakit/ puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan yang yang berasal dari pajak;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>16</sup> Tmbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2013). hlm.3

- (d) Pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat;
- (e) Mensubsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat;
- (f) Membayar utang negara ke luar negeri;
- (g) Membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Selain fungsi budgeter (fungsi penerimaan) diatas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya redistribusi pendapatan, sehingga akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.<sup>17</sup>

#### **d. Pemungutan Pajak**

##### **1) Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel :

- (a) Stesel nyata (Real Stesel)

---

<sup>17</sup>*Ibid*.hlm.3



Pemungutan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni pada saat penghasilan sesungguhnya diketahui.<sup>18</sup>

(b) Stesel Anggapan ( Fictieve Stesel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan.

(c) Stesel Campuran

Stesel ini merupakan campuran antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah sebaliknya, jika kecil kelebihanannya dapat diminta.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm.6

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm.7.

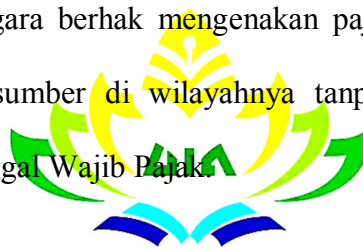
## 2) Asas Pemungutan Pajak

### (a) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

### (b) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.



### (c) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.<sup>20</sup>

## 3) Sistem Pemungutan Pajak<sup>21</sup>

### (a) *Official Assement System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, dan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 7

utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*(b) Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Ciri-cirinya : wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*(c) With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan Wajib Pajak.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.8

#### 4) Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

##### (a) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain : Perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

##### (b) Perlawanan Aktif

Perlawan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain : *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, dan *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).<sup>23</sup>

#### e. Pajak Menurut Syariat Islam


Pajak Menurut Syariat Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* , yang berasal dari kata dasar (*dharaba, yadh ribu, dharban*) yang artinya:

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm8-9

mewajibkan, menetapkan, menentukan memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.<sup>24</sup>

*Dharaba* adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah *dharibah* yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *sim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib*. *dharibah* disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang pajak adalah QS. Al-Taubah[9] ayat 29 sebagai berikut :



قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

Artinya : “ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS AT- Taubah [9] ayat 29)”<sup>25</sup>

(Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian) jika tidak demikian niscaya dari dahulu mereka sudah beriman kepada Nabi saw. (dan mereka

---

<sup>24</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007), hlm..28

<sup>25</sup> *Ibid*, h.30

tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya) seperti khamar (dan tidak beragama dengan agama yang benar) yakni agama yang telah ditetapkan oleh Allah yang mengganti agama-agama lainnya, yaitu agama Islam (yaitu orang-orang) lafal *alladziina* pada ayat ini berkedudukan menjelaskan lafal *alladziina* pada awal ayat (yang diberikan Alkitab kepada mereka) kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani (sampai mereka membayar *jizyah*) *kharaj* yang dibebankan kepada mereka untuk membayarnya setiap tahun (dengan patuh) lafal *yadin* berkedudukan menjadi hal/kata keterangan, artinya, secara taat dan patuh, atau mereka menyerahkannya secara langsung tanpa memakai perantara atau wakil (sedangkan mereka dalam keadaan tunduk) yaitu patuh dan taat terhadap peraturan/hukum Islam.<sup>26</sup>

Secara bahasa *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara

---

<sup>26</sup>“Tafsir ayat Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 29”, tersedia di: <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-29#tafsir-jalalayn> (12 November 2017)

untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>27</sup>

Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariat Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis non-Islam yaitu<sup>28</sup>:

- 1) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu; hanya boleh dipungut ketika di Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sungguhpun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non-Islam (tax) adalah abadi (selamanya).
- 2) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (tax) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 33

- 3) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam (tax) tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.<sup>29</sup>
- 4) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak kadang kala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.
- 5) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Apabila sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam (tax) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.33



6) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan.

Hal ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dan para Khalifah sesudah beliau. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam (tax), pajak tidak akan dihapus karena pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar.<sup>30</sup>

## 2. Kemauan Membayar Pajak

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam yang sadar, berdasarkan pertimbangan pikir dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan. Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak.<sup>31</sup>

*Pertama*, konsep kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa.<sup>32</sup> *Kedua*, konsep pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.34

<sup>31</sup> Devano, S dan Siti Rahayu. "*Perpajakan: Konsep, Teori, Isu*", (Jakarta Kencana, 2006) h.34

<sup>32</sup> Setyawati, Eka. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas* ". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>33</sup> Berdasarkan definisi dari kedua subkonsep diatas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.<sup>34</sup>

Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologis, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.<sup>35</sup>

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan

---

<sup>33</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2007), hlm.1

<sup>34</sup> Tatiana, Vanessa dan Priyo Hari. "*Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*". Makalah Simposium Nasional Perpajakan II, 2009.

<sup>28</sup> Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No.1, 2011

ketentuan yang berlaku. Mengingat kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka secara intensif perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak dengan pekerjaan bebas. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

**a. Kesadaran Membayar Pajak**

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong

royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.<sup>36</sup>

Meskipun sistem pemungutan pajak *self assessment system* sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai disitu justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar.

---

<sup>36</sup> Suryadi (2006) . *Model kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survey di wilayah Jatim* Jurnal Keuangan Publik. Volume 4. No. 1: 105-121

Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak mereka. Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik. Dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan.<sup>37</sup>

#### **b. Pengetahuan Peraturan Perpajakan**

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan bisa diperoleh wajib pajak melalui seminar tentang perpajakan, penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan Dirjen Pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

---

<sup>37</sup> Susanto, Herry, 2012. "Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela WajibPajak". <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru yaitu *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang<sup>38</sup>, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak tau akan fungsi pembayaran pajak. Dan diharapkan sistem ini dapat terwujud keadilan. Yang dimaksud adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah tahu menggunakan Pajak yang sudah dibayarkan sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.<sup>39</sup>

### c. Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

---

<sup>38</sup> Tmbooks, *Perpajakan Esensi dan Aplikasi*, (Yogyakarta : ANDI Yogyakarta, 2013). hlm.3

<sup>39</sup> Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. "Faktor-fakto yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No.1, 2011.

mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-NPWP*, *e-registration*, *e-banking* dan *drop box*, dan lain-lain dapat lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan atau persepsi yang baik kepada hal yang terkait dengan pajak terutama pada sistem perpajakan.



Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. *e-SPT* adalah aplikasi (software) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.<sup>40</sup>

Sedangkan, *e-filling* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan secara sistem online melalui

---

<sup>40</sup> Arya Yogatama “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari*”.(Skripsi Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang 2014.

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Layanan e-filling bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini tentu akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak.<sup>41</sup>

Selain hal di atas, hal lain yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang dapat dirasakan yaitu peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet. Tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar, wajib pajak dapat memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan melalui internet. Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.<sup>42</sup>

Dengan adanya kemudahan sistem perpajakan tersebut akan menimbulkan persepsi yang baik dari masyarakat khususnya wajib

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*



pajak. Dan diharapkan persepsi yang baik ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak bagi wajib pajak.

### **3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketentuan dan tata cara umum perpajakan, salah satu yang dikenai kewajiban untuk menyetorkan pajak adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Kewajiban pajak ini dikenai atas orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas.

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.<sup>43</sup>

Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal profesional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh

penghitungan penghasilan netto selama peredaran usahanya selama satu tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Jika memilih cara ini, maka orang tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan atas peredaran usaha dan penghasilannya (UU No. 28 Tahun 2007). Penghitungan PPh yang terutang (dalam hal ini PPh 21) adalah jumlah kumulatif Penghasilan Kena Pajak (PKP)

---

<sup>43</sup> Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketentuan Dan Tata Cara Umum Perpajakan.

dalam satu tahun takwim dikalikan tarif pasal 17. PKP diperoleh dari total penghasilan bruto dikali 50%. Adapun tarif pasal 17 adalah:<sup>44</sup>

- a.  $\geq 50$  juta : 5%
- b.  $\leq 50$  juta-250 juta : 15%
- c.  $\leq 250$  juta-500 juta : 25%
- d.  $\leq 500$  juta : 30%

Seperti contoh WPOP memiliki penghasilan bruto dalam satu takwim sebesar 60 juta, perhitungan PPh yang terhutang ialah PKP ( $60 \text{ juta} \times 50\%$ ) x tarif pasal 17 ( $\geq 50 \text{ juta} : 5\%$ ) = 1.500.000 pajak terhutang WPOP tersebut.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>45</sup>

WPOP di Bandar Lampung umumnya tidak membuat pembukuan atas harta yang dimilikinya. Wajib pajak pribadi juga kerap tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harta yang seharusnya terhutang bagi wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain masih banyak WPOP di Bandar Lampung yang belum

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm.37

<sup>45</sup> Arum, harjanti puspa. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayabab Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas". Diponegoro journal of Accounting, vol.1, No. 1, 2012.

menggunakan *Self Assessment System* dan memiliki kemauan dalam membayar pajak.


## B. Peneliti – Peneliti Terdahulu

Banyaknya penelitian serupa yang meneliti tentang kemauan membayar pajak, menunjukkan bahwa faktor kemauan menjadi faktor yang cukup penting dalam meningkatkan penerimaan pemerintah di sektor pajak. Namun beberapa dari hasil penelitian terdahulu masih belum memuaskan, terdapat perbedaan dari hasil-hasil penelitian tersebut sehingga menimbulkan adanya *research gap*.

Peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

N O	PENELITI	VARIABEL YANG DIGUNAKAN	ALAT ANALISIS	DATA	HASIL PENELITIAN
1	Widayati dan Nurlis (2010)	Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran memabayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi	Analisis regresi berganda	Data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden	Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sementara pengetahuan dan pemahaman


		yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Variable terikat yang digunakan adalah kemauan membayar pajak			tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
2	Tatiana dan Hari (2009)	<p>Variabel bebas: <i>Sunset policy</i></p> <p>Variabel terikat: Kesadaran membayar pajak, Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan , Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, Kemauan Membayar pajak,</p>	<p>Linear Berganda</p> 	Data dari survey dengan kuesioner dan wawancara	Kebijakan <i>sunset policy</i> memberikan pengaruh positif terhadap ketiga factor faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.
3	Sapti Wuri Handayani Agus Faturokham Umi Pratiwi (2012)	Kesadaran membayar pajak (X1) Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan	Analisis regresi berganda	penelitian survei, yaitu penelitian dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan	1. kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

		<p>Pajak (X2) Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan (X3) Tingkat kepercayaan terhadap Sistem Pemerintahan dan Hukum (X4)</p> <p>Kemauan Membayar Pajak (Y)</p>		<p>menggunakan kuesioner dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden</p>	<p>dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; 2. kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas; 3. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.</p>
4	Monica (2011)	Sunset Policy (X)	regresi linier	data primer berupa	1. Hasil penelitian mendapatkan

		<p>Kesadaran Membayar Pajak (Y1)</p> <p>Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Y2)</p> <p>Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (Y3)</p>	<p>berganda</p>	<p>kuesioner yang diisi oleh responden</p>	<p>bahwa kebijakan sunset policy berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap sunset policy cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak.</p> <p>2. Hasil penelitian mendapatkan bahwa kebijakan sunset policy berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap sunset policy cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan.</p> <p>3. Hasil penelitian mendapatkan bahwa kebijakan sunset policy berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai efektivitas sistem</p>
--	--	--	-----------------	--	---



					perpajakan. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap sunset policy cenderung memiliki persepsi yang lebih positif mengenai efektifitas sistem perpajakan.
5	Hardining sih dan Yulianawa ti (2011)	Variabel: Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan Peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektifitas sistem perpajakan, Kualitas pelayanan, kemauan membayar pajak	Regresi linier Berganda	data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden	Kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan, pemahaman, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
6	Eka Setyawati (2013)	1. Kesadaran membayar pajak(X1) 2. Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X2)	Regresi linier Berganda	data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner	Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dengan nilai beta sebesar 0.235, pengetahuan

		<p>3. Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (X3)</p> <p>4. Kualitas pelayanan(X4)</p> <p>Kemauan untuk Membayar Pajak WP OP yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Y)</p>			<p>peraturan perpajakan dengan nilai beta sebesar 0.217, persepsi yang baik atas sistem perpajakan dengan nilai beta sebesar 0.339, dan kualitas pelayanan dengan nilai beta sebesar 0.431 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah kualitas pelayanan. Dengan nilai beta yang paling besar diantara variable independen lainnya sebesar (0.431).</p>
--	--	--	---	--	--

Sumber : Data diolah dari berbagai referensi 2017.

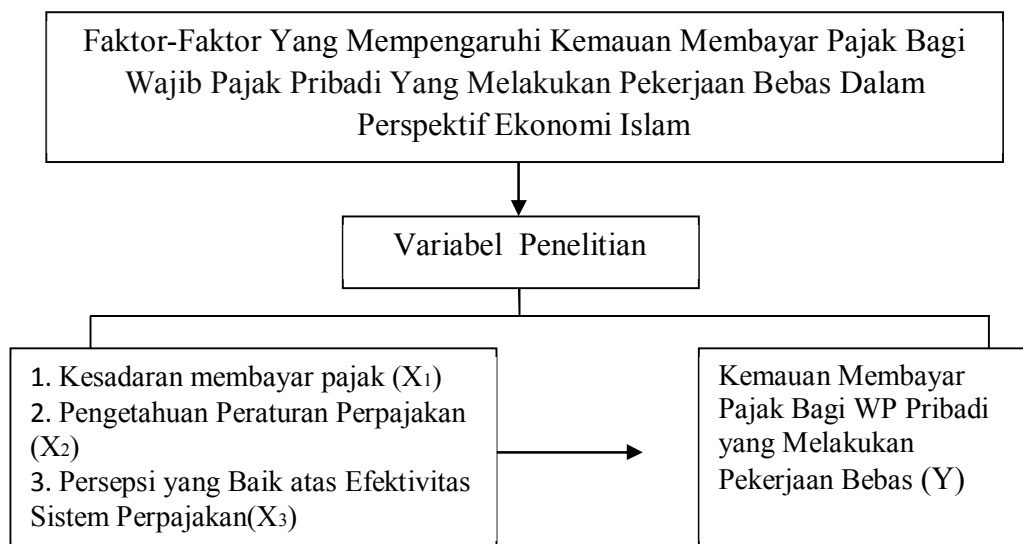


### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak empat variabel yaitu tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu, kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ), pengetahuan peraturan perpajakan ( $X_2$ ), persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan ( $X_3$ ). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas menurut perspektif ekonomi Islam ( $Y$ ).

**Gambar 2.1**


#### **Kerangka Berfikir Penelitian**



Sumber : Data diolah tahun 2017

### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka berfikir.<sup>46</sup> Hipotesis penelitian yang akan diujikan sebagai berikut:

- 
- H<sub>1</sub> : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- H<sub>2</sub> : Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- H<sub>3</sub> : Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
- H<sub>4</sub> : Kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2014).h.93

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian di dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini mengkaji kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Bandar Lampung.

##### **B. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian bersifat empiris yaitu penelitian diperoleh dari percobaan, penemuan, berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan yang telah dilakukan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan melakukan berbagai Uji Statistik untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan data primer. Yang diperoleh dari wawancara dan penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab responden. Dalam penelitian ini kuesioner bersifat tertutup dalam arti bahwa pihak peneliti menyediakan alternative jawaban sehingga responden hanya tinggal memilih jawaban. Dalam pengambilan data penelitian ini dilakukan

pada Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Kedaton.

### C. Sumber Data

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu:

1. Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para responden yang terpilih. Responden tersebut yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang ada di kota Bandar Lampung dan terdaftar di KPP Pratama Kedaton.
2. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses *website* maupun situs.<sup>47</sup>

### D. Metode Penelitian Sampel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan

---

<sup>47</sup> *Ibid*

diteliti dalam populasi berupa orang, perusahaan lembaga, media dan sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Kedaton. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 32.501 wajib pajak pribadi. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan teknik *convenience sampling*. Teknik *convenience sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel.<sup>48</sup> Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut :<sup>49</sup>

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \text{Jumlah Sampel}$$

---

<sup>48</sup> Arya Yogatama,” Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari”.(Skripsi Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang 2014).h.66.

<sup>49</sup> *Ibid*, h.67

N = Populasi  
 e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Kedaton hingga tahun 2017, tercatat sebanyak 32.501 wajib pajak orang pribadi yang efektif. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{32.501}{1 + 32.501 (0,1)^2}$$

$$n = 99,6$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak pribadi.<sup>50</sup>

#### E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metohtde sebagai berikut:

##### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang dibutuhkan, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen. Data penelitian ini juga diperoleh dari berbagai sumber seperti buku teori,

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h.51

jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang memuat teori penelitian serta sumber-sumber pustaka lainnya.<sup>51</sup>

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti laporan tahunan, dokumentasi yang dimiliki perusahaan, buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan makalah ini. Data dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Kedaton yaitu data wajib pajak pribadi serta struktur organisasi dan sejarah KPP Pratama Kedaton<sup>52</sup>.

## 3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim pos atau internet.<sup>53</sup> Kuesioner pada penelitian ini akan diberikan kepada responden yaitu wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Kedaton dan untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert.

---

<sup>51</sup> Nurul Zariah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2007), hlm.192

<sup>52</sup> *Ibid*, h.194

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,(Bandung:ALFABETA,2014),h.199

## **F. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan program *SPSS 16.0 for windows* yang digunakan dalam metode analisis data untuk Uji Statistik Deskriptif, Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, dan Uji Hipotesis.

### **1. Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti, yang mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.<sup>54</sup>

### **2. Kualitas Data**

Dalam menganalisis data penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h.147



signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya.<sup>55</sup>

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dikatakan untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$ . Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel  $> 0,6$  maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha*  $< 0,6$  maka butir pertanyaan tidak reliabel.<sup>56</sup>

### 3. Analisis Pengujian Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil pengujian baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif. Asumsi klasik yang diuji yaitu: Uji Normalitas dan Uji Multikolinearitas.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*,h..276

<sup>56</sup> *Ibid*,h.276

<sup>57</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 160.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Jika melihat hanya melalui histogram, akan kurang meyakinkan untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan

pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.<sup>58</sup>

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dikatakan terjadi Multikolinearitas jika antar independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.<sup>59</sup>

#### 4. Analisis Regresi Linear Berganda

a. Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan metode Regresi Linear Berganda karena analisis regresi ini menggunakan dua variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini berguna untuk

---

<sup>58</sup> *Ibid*,h.165

<sup>59</sup> *Ibid*,h.169

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Uji regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

a : Konstanta (harga Y, bila X=0)

$\beta$  : Koefisiensi regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

X<sub>1</sub> : Kesadaran Membayar Pajak

X<sub>2</sub> : Pengetahuan Peraturan Perpajakan

---

<sup>60</sup> *Ibid*,h.277.

$X_3$  : Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

$e$  : error

b. Uji  $R^2$  (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.<sup>61</sup>

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 1$ , maka  $\text{adjusted } R^2 = R^2 = 1$  sedangkan jika nilai  $R^2 = 0$ , maka

---

<sup>61</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, (Jakarta : Universitas Diponegoro Edisi IV, 2009).h.65

adjusted  $R^2 = (1-k)/(n-k)$ , jika  $k > 1$ , maka adjusted  $R^2$  akan bernilai negatif.<sup>62</sup>

## 5. Uji Hipotesis

### a. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) *Quick look*: Bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_i = 0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan uji t untuk menguji signifikansi koefisien regresi dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis :

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h.66

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikasi antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikasi antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.<sup>63</sup>

b. Uji statistik F (signifikansi simultan)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau;  $H_o: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$  Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:  $H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$  Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. Untuk menguji

---

<sup>63</sup> *Ibid*,h.166

hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) *Quick look*: Bila nilai F lebih besar dari pada 5 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai Fhitung lebih besar dari pada nilai Ftabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .<sup>64</sup>

#### **G. Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya**

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen, yaitu:

##### **1. Variabel Independen (X)**

###### **a. Kesadaran Membayar Pajak ( $X_1$ )**

Kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi yang menimbulkan kegiatan yang terarah tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya. Sehingga kesadaran perpajakan adalah kesadaran mengetahui atau mengerti perihal

---

<sup>64</sup> *Ibid*,h.167



pajak.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini kesadaran membayar pajak diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2011), yaitu:

- 1) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- 2) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
- 3) Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
- 4) Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.
- 5) Pemungutan pajak sesungguhnya juga dirasakan oleh mereka sendiri tapi tidak secara langsung dinikmati oleh para wajib pajak.
- 6) Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.


#### **b. Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif

---

<sup>65</sup> Atiqah dan Verisca Dena Fitria. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT”. Akuntabilitas, Vol. 3 No. 1, 2010.

terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan adapula yang diperoleh dari penelitian pajak. Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara komprehensif menyentuh dunia pendidikan.<sup>66</sup> Dalam penelitian ini pengetahuan wajib pajak diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Supriyati dan Hidayati (2008) yaitu:

- 
- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
  - 2) Pajak berguna bagi masyarakat
  - 3) Tidak dapat imbalan langsung
  - 4) Adanya sanksi perpajakan
  - 5) *Self Assessment System*
  - 6) Kepemilikan NPWP

**c. Persepsi yang Baik atas efektifitas Sistem Perpajakan (X3)**

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target

---

<sup>66</sup> Supriyati dan Nur Hidayati. "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol.7 No.1, 2008.

(kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Widayati dan Nurlis (2010), yaitu:

- 1) Pembayaran pajak melalui *e-Banking*.
- 2) Pembayaran SPT melalui *e-SPT* dan *e-Filling*.
- 3) Penyampaian SPT melalui *drop box*.
- 4) *Update* peraturan pajak terbaru secara *online* melalui internet.
- 5) Pendaftaran NPWP melalui *e-Register*.

Alat yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan adalah dengan menyebarkan kuisisioner. Agar data hasil kuesioner yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis diperlukan suatu skala pengukuran atas jawaban setiap responden. Dalam hal ini skala 5 tingkat (*likert*) untuk mengukur kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan yang terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kelima penelitian ini diberi bobot sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Widayati dan Nurlis. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Terhadap Variabel Independen**

No	Uraian	Skala
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu – Ragu (RR)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

## 2. Variabel Dependen (Y)

Kemauan membayar pajak sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.<sup>68</sup> Dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan oleh Hardiningsih dan Yulianawati (2010) dengan menggunakan skala *Likert*, yaitu:

- a. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
- b. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
- c. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.
- d. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
- e. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

---

<sup>68</sup> Tatiana, Vanessa dan Priyo Hari. “Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II, 2009.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil dan Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

###### **Pratama Kedaton**

Pelaksanaan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton dibawah kantor wilayah di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yang dimulai beroperasi sejak tanggal 9 September tahun 2008 dan menempati gedung ex KPBB Bandar Lampung. Dengan keputusan Direktorat Jenderal pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 A tanggal 4 September 2008 tentang penerapan organisasi, dan tata kerja dan saat beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Serta Kantor pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung.

Kantor pelayanan Pajak Pratama kedaton beralamat di Jl. Dr. Susilo No.41 Teluk Betung Utara Bandar Lampung.

Kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton mempunyai Visi, Misi, janji dan Motto yaitu sebagai berikut :

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton

Menjadikan Institusi Pelayanan Terpercaya dan Terbaik

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton

Mensukseskan Penerimaan Pajak dengan menerapkan Pelayanan Prima yang Dapat Dipercaya oleh Masyarakat Melalui sistem Administrasi Modern.

c. Janji Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton

Anda lengkap kami cepat, Anda taat kami Hormat

d. Motto Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton

Berdasarkan Wajib Pajak mengurangi Era Perpajakan Modern.

## 2. Wilayah Kerja

a. **Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton**

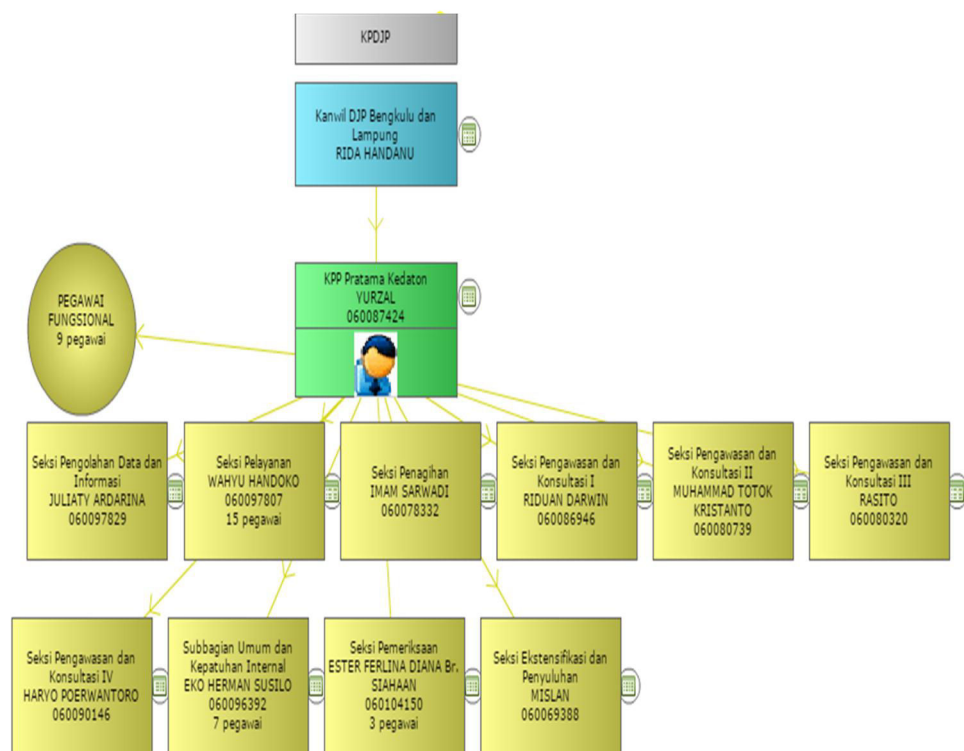
Wilayah kerja Kantor Pelayanan pajak Pratama Kedaton meliputi 7 (tujuh) Kecamatan yang ada di kota bandar lampung yaitu : Kecamatan Sukarame, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Seneng , kecamatan Way halim dan Kecamatan Labuhan Ratu.

Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam satu wadah untuk mencapai tujuan bersama, struktur juga

mencerminkan tugas tanggung jawab dan wewenang dari setiap bagian yang ada di dalam organisasi.

Struktur organisasi tersebut mendukung penugasan yang terspesialisasi sehingga mendorong terwujudnya pegawai yang lebih profesional dalam menjalankan tugas.

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Kedaton**



Sumber : Data KPP Pratama Kedaton 2017

Berdasarkan struktur organisasi yang dimiliki maka dengan masing – masing tugas sebagai berikut :

1) Kantor Kepala

Kantor kepala mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung.

2) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub bagian umum dan kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian , keuangan , tata usaha, dan rumah tangga.

3) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP) yaitu melakukan penerimaan dan mengelolah penerimaan dan mengolah surat pemberitahuan (SPT) pajak serta surat lain, mengadministrasikan dokumen dan berkas pajak, penempatan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penyuluhan perpajakan dan registrasi wajib pajak (WP).

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi pengolahan data dan informasi (PDI) mempunyai tugas pengumpulan data, mencari data dan mengolah data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyimpanan laporan kinerja.



5) Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON)

Seksi pengawasan dan konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan, kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangkaian intensifikasi pajak.

7) Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan kegiatan piñata usaha, piutang pajak, penagihan aktif, pembuatan palsu, penghapusan piutang pajak, penyitaan dan pelelangan.

8) Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan penagihan potensi perpajakan dengan cara melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

9) Seksi Fungsional

Seksi fungsional mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tujuan lainnya.

#### **b. Unit dan Program Kerja**

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak dibidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnyanya.




Jenis-jenis pelayanan kepada wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kedaton terdiri atas :

- 1) Pelayanan bidang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- 2) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Pengukuhan pengusaha kena pajak.
- 4) Perubahan data dan identitas Wajib Pajak.
- 5) Mutasi NPWP karena pindah domisili / tempat kedudukan.
- 6) Penghapusan NPWP.
- 7) Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak.
- 8) Penyampaian Surat pemberitahuan (SPT masa dan Tahunan).
- 9) Pelaporan pelunasan surat ketetapan pajak.
- 10) Permohonan peninjauan kembali.
- 11) Permohonan keberatan.

- 12) Permohonan pemindah bukuan.
- 13) Permohonan mengangsur / menunda pembayaran pajak.
- 14) Permohonan pengembalian kelebihann pembayaran pajak (retribusi/PLB)
- 15) Pencabutan sita.
- 16) Pembatalan lelang.
- 17) Pemberitahuan pembukuan dengan menggunakan komputer.

## **B. Analisis dan Pembahasan**



Analisis data dilakukan dengan cara yakni uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan model regresi linear berganda, data yang tersedia bagi variabel dependen yaitu kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan variabel independen yang terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan.

Analisis dilakukan dengan menguji pengaruh ketiga variabel independen terhadap variabel dependen kemauan untuk membayar pajak, secara parsial melalui uji t dan secara simultan melalui uji F.

### **1. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Statistik deskriptif berkaitan dengan

pengumpulan dan peringkat data, yang menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Kedaton. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti, yang mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

Tabel 4.2  
Hasil Uji Statistik Deskriptif



Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Membayar Pajak	100	14	30	22.46	3.702
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	100	17	33	25.46	3.514
Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	100	12	25	19.87	2.776
Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas	100	20	39	29.28	4.692
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah tahun 2017

Tabel 4.2 menjelaskan pada variabel kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ) dari 100 responden lebih banyak yang memiliki tingkat kesadaran

membayar pajak, dilihat dari jawaban minimum responden sebesar 14 dan maksimum sebesar 30 dengan rata-rata (mean) total jawaban 22,46 dan standar deviasi 3,702.

Variabel pengetahuan peraturan perpajakan ( $X_2$ ) dari 100 responden lebih banyak yang memiliki tingkat pengetahuan peraturan perpajakan, dilihat dari jawaban minimum responden 17 dan maksimum sebesar 33 dengan rata-rata (mean) total jawaban 25,46 dan standar deviasi 3,514.

Pada variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan ( $X_3$ ) dari 100 responden lebih sedikit yang memiliki tingkat persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dilihat dari minimum jawaban responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 25 dengan rata-rata (mean) total jawaban 19,87 dan standar deviasi 2,776.

Variabel kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Y) dari 100 responden memiliki keseimbangan antara tingkat kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan yang tidak, dilihat dari jawaban minimum responden sebesar 20 dan maksimum sebesar 39 dengan rata-rata (mean) 29,28 dan standar deviasi 4,692. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari penelitian ini cukup baik, karena nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang mengindikasikan bahwa standar error dari setiap variabelnya kecil.

## 2. Hasil Uji Kualitas Data

Dalam menganalisis data penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi di bawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya.<sup>69</sup>

**Tabel 4.3**  
**Uji Validitas Instrumen Kesadaran Membayar Pajak**

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
K1	.852**	.000	Valid
K2	.765**	.000	Valid
K3	.746**	.000	Valid
K4	.791**	.000	Valid
K5	.797**	.000	Valid
K6	.772**	.000	Valid

Sumber : Data diolah tahun 2017

Tabel 4.3 Terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel Kesadaran Membayar Pajak (K) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>69</sup> *Ibid*,h..276

pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

**Tabel 4.4**  
**Uji Validitas Instrumen Pengetahuan Peraturan Perpajakan**

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
P1	.679**	.000	Valid
P2	.624**	.000	Valid
P3	.551**	.000	Valid
P4	.354**	.002	Valid
P5	.654**	.000	Valid
P6	.586**	.000	Valid
P7	.665**	.000	Valid

Sumber : Data diolah tahun 2017

Tabel 4.4 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan (P) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

**Tabel 4.5**  
**Uji Validitas Instrumen Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan**

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
PE1	.624**	.000	Valid
PE2	.718**	.000	Valid
PE3	.662**	.000	Valid
PE4	.754**	.000	Valid
PE5	.735**	.000	Valid

Sumber : Data diolah tahun 2017

Tabel 4.5 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (PE) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

**Tabel 4.6**  
**Uji Validitas Instrumen Kemauan untuk Membayar Pajak WP**  
**OP yang Melakukan Pekerjaan Bebas**

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
KM1	.767**	.000	Valid
KM2	.706**	.000	Valid
KM3	.583**	.000	Valid
KM4	.719**	.000	Valid
KM5	.677**	.000	Valid
KM6	.629**	.000	Valid
KM7	.632**	.000	Valid
KM8	.687**	.000	Valid

Sumber : Data diolah tahun 2017

Tabel 4.6 terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel yang memiliki subvariabel Kemauan untuk Membayar Pajak bagi Wajib Pajak Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (KM) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.



b. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha*. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengukur koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,6$ . Apabila *Cronbach Alpha* dari suatu variabel  $> 0,6$  maka butir pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut adalah reliabel/dapat diandalkan. Sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha*  $< 0,6$  maka butir pertanyaan tidak reliabel.<sup>70</sup>

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen terhadap 100 responden.

**Tabel 4.7**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	N of Item	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak	0.884	6	Reliabel
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	0.701	7	Reliabel
Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	0.754	5	Reliabel
Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas	0.831	8	Reliabel

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel diatas yaitu tabel 4.7 menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini

---

<sup>70</sup> *Ibid*,h.276

reliabel karena mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

### 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil pengujian baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif. Asumsi klasik yang diuji yaitu: Uji Normalitas dan Uji Multikolinearitas.<sup>71</sup>

#### a. Uji Normalitas

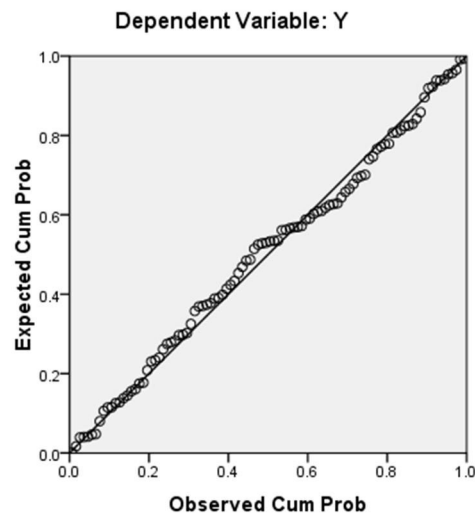
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Berikut gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp – plot.

---

<sup>71</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 160.

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas Data**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan grafik normal pp - plot pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Pengujian multikolineritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikolinear, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen.

**Tabel 4.8**  
**Uji Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance
1	(Constant)	3.413	4.345		.785	.434	
	X1	.485	.110	.382	4.388	.000	.965
	X2	.248	.115	.186	2.152	.034	.980
	X3	.436	.149	.258	2.929	.004	.946

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah tahun 2017

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *Tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) disekitar angka 1. Kesadaran membayar pajak mempunyai nilai *tolerance* 0.965, pengetahuan peraturan perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0.980, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0.946. Dan kesadaran membayar pajak mempunyai nilai VIF 1.037, pengetahuan peraturan perpajakan mempunyai nilai VIF 1.021, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai nilai VIF 1.057. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat masalah multikolonieritas karena nilai *tolerance* di atas 0.10 dan nilai VIF (*variance inflation factor*) dibawah 10.

#### 4. Hasil Uji Regresi Berganda

##### a. Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis ini berguna untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Uji regresi dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat tabel dibawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.413	4.345		.434
	X1	0.485	0.110	0.382	.000
	X2	0.248	0.115	0.186	.034
	X3	0.436	0.149	0.258	.004

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 3.413 + 0.485 X_1 + 0.248 X_2 + 0.436 X_3$$

Keterangan :

Y : Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas

a : Konstanta (harga Y, bila X=0)

$\beta$  : Koefisiensi regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

X<sub>1</sub> : Kesadaran Membayar Pajak

X<sub>2</sub> : Pengetahuan Peraturan Perpajakan

X<sub>3</sub> : Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 3,413 artinya kesadaran membayar pajak (X<sub>1</sub>), pengetahuan peraturan perpajakan (X<sub>2</sub>), dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X<sub>3</sub>), dianggap konstan maka kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan

pekerjaan bebas konstan sebesar 3,413. Koefisien regresi variabel kesadaran membayar pajak (X1) sebesar 0,485 artinya kesadaran membayar pajak mengalami kenaikan 4%, maka kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,485 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel pengetahuan peraturan perpajakan (X2) sebesar 0,248 artinya pengetahuan peraturan perpajakan mengalami kenaikan 2%, maka kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,248 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Koefisien regresi variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3) sebesar 0,436 artinya persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mengalami kenaikan 4%, maka kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,436 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

**b.  $R^2$  (Koefisien Determinasi)**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan) secara serentak terhadap variabel dependen (kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas).

Ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen, koefisien dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics				Durbin-Watson
					F Change	df1	df2	Sig. F Change		
1	0.545 <sup>a</sup>	0.297	0.275	3.99591	.297	13.513	3	96	.000	1.951

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.10 *Model Summary*, diperoleh nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,275. Hal ini menunjukkan bahwa persentase



sumbangan pengaruh variabel independen (kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan ) terhadap variabel dependen (kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas) sebesar 27,5%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan) mampu menjelaskan sebesar 27,5% variansi variabel dependen (kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas). Sedangkan sisanya sebesar 72,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti variabel pemahaman peraturan perpajakan, *sunset policy*, dan kualitas pelayanan KPP.

## 5. Hasil Uji Hipotesis

### a. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.10, jika nilai *probability t* < 0,05, maka  $H_a$  diterima, sedangkan jika nilai *probability t* > 0,05 maka  $H_a$  ditolak.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Statistik t**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	3.413	4.345		.785
	X1	.485	.110	.382	4.388
	X2	.248	.115	.186	2.152
	X3	.436	.149	.258	2.929

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah tahun 2017



Tabel 4.11 diatas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Dari ketiga variabel bebas tersebut yang dimasukkan dalam model regresi menghasilkan nilai yang signifikan  $p\text{-value} < 0,05$ . Ini terlihat dari variabel bebas kesadaran membayar pajak ( $X_1$ ) diperoleh  $t\text{ hitung} = 4,388$  yakni lebih besar dari  $t\text{ tabel} = 1,98$ . Dengan demikian berarti bahwa secara parsial kesadaran membayar pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan. Kesimpulannya bahwa  **$H_{a1}$  diterima.**

Untuk variabel bebas yang kedua pengetahuan peraturan perpajakan ( $X_2$ ) diperoleh nilai  $t\text{ hitung} = 2,152 > 1,98$  ( $t\text{ tabel}$ ). Hal ini berarti bahwa secara parsial pengetahuan peraturan perpajakan

berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai  $0,034 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh positif yang signifikan. Kesimpulannya **Ha<sub>2</sub> diterima**.

Untuk variabel bebas ketiga yaitu persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X<sub>3</sub>) diperoleh nilai t hitung =  $2,929 > 1,98$  (t tabel) . Hal ini berarti bahwa secara parsial persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara positif signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Demikian juga hasil positif yang signifikan menunjukkan nilai  $0,004 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulannya **Ha<sub>3</sub> diterima**.

#### **b. Hasil Signifikan Simultan (Uji Statistik F)**

Uji statistik F atau uji kelayakan model penelitian, bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah apabila probabilitas  $> 0,05$  maka Ho diterima sedangkan sebaliknya jika probabilitas  $< 0,05$  maka Ho ditolak.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	647.297	3	215.766	13.513	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1532.863	96	15.967		
	Total	2180.160	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai f hitung = 13,513 > 2,699 (f tabel) dan nilai signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (p-value) 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) ini berarti bahwa variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Kesimpulannya **H<sub>4</sub> diterima**.

Dalam uji statistik ini model penelitian sudah tepat karena adanya nilai yang signifikan pada setiap variabel juga. Dengan demikian semakin tinggi kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kemauan untuk membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

### **3. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas.**

Kebijakan umum ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif (QS. Al-Hasyr[59] :7). Dengan prinsip keadilan ini, Al-Quran menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan. Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing.<sup>72</sup>



Ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan cara ini, setiap warga negara akan mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak sebagai manusia. Pemerintah suatu negara bertanggung jawab atas terwujudnya taraf hidup minimum bagi semua warga negaranya.<sup>73</sup>

Sistem Perpajakan yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya, dengan adanya penerimaan negara yang besar dapat mendukung pembangunan negara yang lebih maju dan mendukung taraf hidup warga negara menjadi lebih baik.

---

<sup>72</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2009 ).hlm.392

<sup>73</sup>*Ibid*,hlm.393

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (Mu'amalah), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah SWT) maka dia adalah zalim" (QS Al-maidah[5]:45).<sup>74</sup>

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak yaitu :

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat :

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

- b. Gazy Inayah berpendapat :

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang bersifat mmengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.


---

<sup>74</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.20

c. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.<sup>75</sup>

Dari beberapa definisi para ulama tentang pajak, pendapat dari Abdul Qadim Zallum terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

- 
- a. Diwajibkan oleh Allah SWT.
  - b. Objeknya adalah harta (*al-maal*)
  - c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim.
  - d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim) saja.
  - e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri).

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur:

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm.31

- a. Harus adanya nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non Muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.<sup>76</sup>



Sistem perpajakan dapat berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur demi pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun masyarakat pula berkewajiban untuk mewujudkannya. Dengan menyadari bahwa setiap individu membutuhkan individu lain, sehingga manusia menjadi makhluk individu, sekaligus makhluk sosial.

Dengan adanya kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi dimana setiap individu ditanamkan kesadaran membayar pajak, memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta adanya persepsi baik atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan membayar pajak maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima negara khususnya wilayah kota Bandar Lampung, sehingga pembangunan kota

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm.32



Bandar Lampung semakin baik dan maju serta mensejahterahkan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, pada wilayah kerja KPP Pratama Kedaton. Data yang diambil berdasarkan dari hasil kuesioner yang diisikan kepada para responden dan di analisa dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012), Tatiana dan Hadi (2009), Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Widayati dan Nurlis (2010).
2. Kebijakan umum ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif (QS. Al-Hasyr[59] :7). Dengan prinsip keadilan ini, Al-

Quran menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan. Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing.<sup>77</sup>

Sistem Perpajakan yang menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara merupakan salah satu cara pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya, dengan adanya penerimaan negara yang besar dapat mendukung pembangunan negara yang lebih maju dan mendukung taraf hidup warga negara menjadi lebih baik.

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*Mu'amalah*), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak dapat menjadi alat penindas rakyat. Hanya syariat yang boleh menjadi pemutus perkara, apakah suatu jenis pajak boleh dipungut atau tidak. “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut syariat (apa yang telah ditetapkan Allah SWT) maka dia adalah zalim” (QS Al-maidah[5]:45).

Dengan adanya kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi dimana setiap individu ditanamkan kesadaran membayar pajak, memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta adanya

---

<sup>77</sup>Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2009 ).hlm.392

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan membayar pajak maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima negara khususnya wilayah kota Bandar Lampung, sehingga pembangunan kota Bandar Lampung semakin baik dan maju serta mensejahterahkan masyarakat.

## **B. Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Disisi lain, keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penelitian yang akan datang. Adapun saran dan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat atau pun wajib pajak lainnya, bahwa kemauan membayar pajak lebih ditingkatkan lagi seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan pajak yang lebih didalami lagi serta adanya persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan, sehingga tingkat penerimaan negara dari sektor pajak semakin meningkat dan berdampak positif bagi pembangunan Negara.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak sebaiknya mengadakan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat secara lebih menyeluruh agar masyarakat lebih paham tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan juga DJP sebaiknya mengadakan lagi program-program pengampunan pajak seperti Sunset Policy dan Tax Amnesty agar masyarakat lebih tertarik untuk membayar kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak.

3. Bagi penulis selanjutnya yang ingin meneruskan penelitian ini sebaiknya lebih dilakukan lebih mendalam masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, seperti menambah variabel independen nya, memperluas wilayah cangkupan objek penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang generalisasinya lebih tinggi dan juga dapat membahas tentang pajak dalam perspektif ekonomi Islam secara menyeluruh.



## DAFTAR PUSTAKA

Arya Yogatama, ” *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari*”.(Skripsi Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang 2014)

Arum, Harjanti Puspa. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*”. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 1, No. 1, 2012.



Atiqah dan Verisca Dena Fitria. “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT*”. Akuntabilitas, Vol. 3 No. 1, 2010.

Chalil, Zaki Fuad. “*Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*”, Erlangga, Jakarta, 2009.

Devano, S dan Siti Rahayu. “*Perpajakan: Konsep, Teori, Isu*”, Kencana, Jakarta, 2006.

Faisal, Gatot. “*How to be a Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi Wajib Pajak yang Cerdas*”, Grasindo, Jakarta, 2009.

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, ( Jakarta : Universitas Diponegoro Edisi IV, 2009)

Ghazali, Imam. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21”*;: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

Gusfahmi. *“Pajak Menurut Syariah”* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. *”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”* Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No.1, 2011



Karl dan Case. *“Prinsip – Prinsip Ekonomi”*, Erlangga, Jakarta, 2007.

Mardiasmo. *“Perpajakan”*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

Mardiasmo. *“Perpajakan”*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.

Mulyo Agung. *“Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia”*, Dinamika Ilmu, Jakarta 2007.

Zariah, Nurul. *“Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan”*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Noor, Juliansyah. *“Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah”*, Kencana, Jakarta, 2011.

Pandangan, Liberti. *“Administrasi Perpajakan”*, ERLANGGA, Jakarta, 2014

Rantung dan Adi, *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Jurnal perpajakan, 2009.

Sanjaya, Okta. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung*, 23 Maret 2009.

Setyawati, Eka. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas ”*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Sugiyono. *“Penelitian Administrasi”*, Alfabeta, Bandung, 2001.

Sugiyono. *“Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)”*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Sugiyono. *“Metode Penelitian Bisnis”*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Supriyati dan Nur Hidayati. *“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”*. Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol.7 No.1, 2008.



Suryadi (2006) . *Model kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak: Suatu survey di wilayah Jatim* Jurnal Keuangan Publik. Volume 4. No. 1: 105-121

Susanto, Herry, 2012. “Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak”. <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>.

Tatiana, Vanessa dan Priyo Hari. “*Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*”. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II, 2009.

Tmbooks. “*Perpajakan Esensi dan Aplikasi*”, ANDI Yogyakarta , Yogyakarta, 2013.

UU Republik Indonesia, *Pengampunan Pajak*, , Nomor 11 tahun 2016

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketentuan Dan Tata Cara Umum Perpajakan.

Widaningrum, Dwi. 2007. Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah.. 23 Maret 2009.

Widayati dan Nurlis. *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2010.



Lampiran :

**HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	14.00	30.00	22.4600	3.70209
X2	100	17.00	33.00	25.4600	3.51453
X3	100	12.00	25.00	19.8700	2.77673
Y	100	20.00	39.00	29.2800	4.69274
Valid N (listwise)	100				

**HASIL UJI RELIABILITAS KESADARAN MEMBAYAR PAJAK**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.884	6

**HASIL UJI RELIABILITAS PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.701	7

**HASIL UJI RELIABILITAS PERSEPSI BAIK ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN**

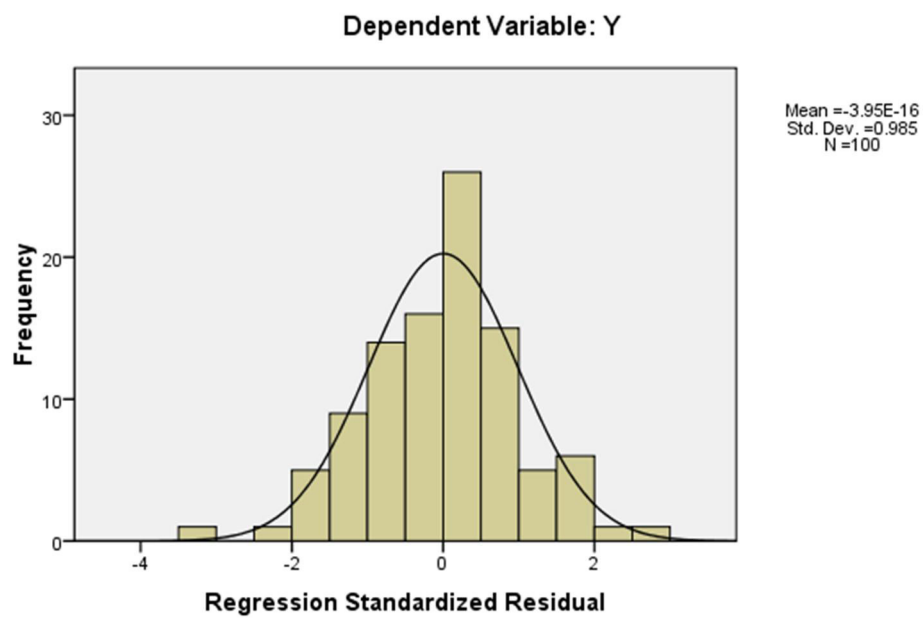
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.754	5

## HASIL UJI RELIABILITAS KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

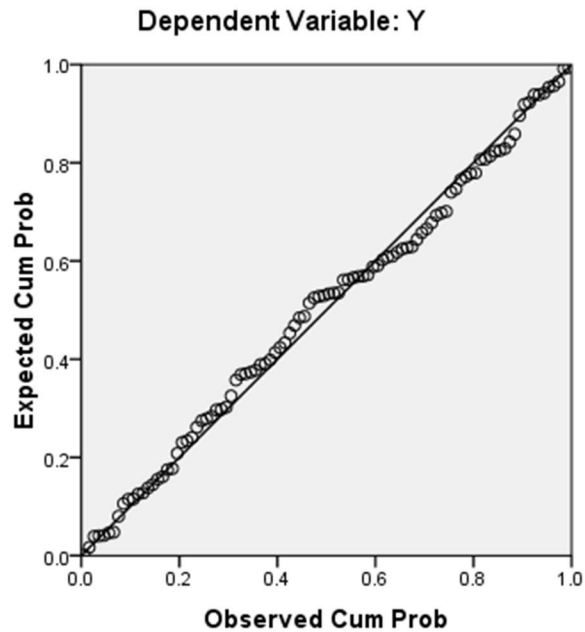
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.831	8

## HASIL UJI NORMALITAS

Histogram



### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### HASIL UJI MULTIKOLONIERRITAS

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized		Standardized				
		Coefficients		Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.413	4.345		.785	.434		
	X1	.485	.110	.382	4.388	.000	.965	1.037
	X2	.248	.115	.186	2.152	.034	.980	1.021
	X3	.436	.149	.258	2.929	.004	.946	1.057

a. Dependent Variable: Y

### Correlations

### HASIL ANALISIS KOEFISIEN DETERMINASI R<sup>2</sup>

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.545 <sup>a</sup>	.297	.275	3.99591	.297	13.513	3	96	.000	1.951

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

## **HASIL UJI STATISTIK F**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	647.297	3	215.766	13.513	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1532.863	96	15.967		
	Total	2180.160	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

## **HASIL UJI STATISTIK t**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.413	4.345		.785	.434
	X1	.485	.110	.382	4.388	.000
	X2	.248	.115	.186	2.152	.034
	X3	.436	.149	.258	2.929	.004

a. Dependent Variable: Y

### **HASIL UJI VALIDITAS KESADARAN MEMBAYAR PAJAK**

		Correlations						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	T.K
K1	Pearson Correlation	1	.746**	.561**	.702**	.546**	.489**	.852**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
K2	Pearson Correlation	.746**	1	.534**	.505**	.431**	.426**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
K3	Pearson Correlation	.561**	.534**	1	.567**	.474**	.547**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
K4	Pearson Correlation	.702**	.505**	.567**	1	.624**	.512**	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
K5	Pearson Correlation	.546**	.431**	.474**	.624**	1	.753**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
K6	Pearson Correlation	.489**	.426**	.547**	.512**	.753**	1	.772**

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
T.K	Pearson	.852**	.765**	.746**	.791**	.797**	.772**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### **HASIL UJI VALIDITAS PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN**

		Correlations							
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	T.P
P1	Pearson	1	.369**	.152	.141	.282**	.393**	.440**	.679**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)		.000	.132	.162	.004	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P2	Pearson	.369**	1	.473**	.074	.234*	.200*	.232*	.624**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.465	.019	.046	.020	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P3	Pearson	.152	.473**	1	.244*	.298**	.160	.083	.551**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.132	.000		.014	.003	.112	.410	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P4	Pearson	.141	.074	.244*	1	.216*	.017	.034	.354**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.162	.465	.014		.031	.868	.738	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P5	Pearson	.282**	.234*	.298**	.216*	1	.209*	.420**	.645**
	Correlation								
	Sig. (2-tailed)	.004	.019	.003	.031		.037	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P6	Pearson	.393**	.200*	.160	.017	.209*	1	.453**	.586**
	Correlation								



	Sig. (2-tailed)	.000	.046	.112	.868	.037		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
P7	Pearson Correlation	.440**	.232*	.083	.034	.420**	.453**	1	.665**
	Sig. (2-tailed)	.000	.020	.410	.738	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
T.P	Pearson Correlation	.679**	.624**	.551**	.354**	.645**	.586**	.665**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



### **HASIL UJI VALIDITAS PERSEPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIFITAS PERPAJAKAN**

		Correlations					
		PE1	PE2	PE3	PE4	PE5	T.PE
PE1	Pearson Correlation	1	.362**	.307**	.237*	.374**	.624**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.018	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PE2	Pearson Correlation	.362**	1	.365**	.470**	.361**	.718**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
PE3	Pearson Correlation	.307**	.365**	1	.395**	.374**	.662**



KM3	Pearson Correlation	.324**	.441**	1	.451**	.095	.349**	.270**	.195	.583**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.345	.000	.007	.051	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KM4	Pearson Correlation	.627**	.502**	.451**	1	.481**	.307**	.201*	.392**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.002	.044	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KM5	Pearson Correlation	.518**	.318**	.095	.481**	1	.310**	.474**	.556**	.677**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.345	.000		.002	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KM6	Pearson Correlation	.363**	.299**	.349**	.307**	.310**	1	.353**	.498**	.629**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.002	.002		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KM7	Pearson Correlation	.301**	.272**	.270**	.201*	.474**	.353**	1	.606**	.632**
	Sig. (2-tailed)	.002	.006	.007	.044	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
KM8	Pearson Correlation	.362**	.268**	.195	.392**	.556**	.498**	.606**	1	.687**
	Sig. (2-tailed)	.000	.007	.051	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
T.KM	Pearson Correlation	.767**	.706**	.583**	.719**	.677**	.629**	.632**	.687**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

